

Judul : Tindak Lanjuti Temuan BPK
Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Tindak Lanjuti Temuan BPK Menhub Tuntaskan 56 Kasus Kerugian Keuangan Negara

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan, pihaknya sudah menyelesaikan 56 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 433,94 miliar dari 74 kasus hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I-2018 senilai Rp 590,87 miliar.

"Yang belum terselesaikan 17 kasus senilai Rp 39,86 miliar atau 22,97 persen. Dan, ada 1 kasus dihapuskan karena sudah inkrah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 21,73 miliar," ungkap BKS, sapaan akrab Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR mengenai hasil temuan BPK di Jakarta, kemarin.

Dari total 17 kasus yang belum terselesaikan, dipaparkan BKS, dua kasus kerugian negara ada pada bendahara senilai Rp 128,63 juta. Dua kasus terhadap pegawai negeri bukan bendahara senilai Rp 204,97 juta. Dan, 13 kasus kerugian negara terhadap pihak ketiga senilai Rp 39,53 miliar.

Sementara mengenai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang harus ditindaklanjuti, lanjut BKS, dari 971 rekomendasi senilai Rp 2,18 triliun dan 3,52 juta dolar AS, sudah diselesaikan sebanyak 74,87 persen atau 727 rekomendasi senilai Rp 1,84 triliun dan 1,69 juta dolar AS.

Untuk rekomendasi yang belum sesuai sejumlah 216 re-

"Yang belum terselesaikan 17 kasus senilai Rp 39,86 miliar atau 22,97 persen. Dan, ada 1 kasus dihapuskan karena sudah inkrah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 21,73 miliar."

komendasi atau 22,25 persen senilai Rp 320,5 miliar dan 1,82 juta dolar AS. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi atau 2,47 persen senilai Rp 4,18 miliar. Dan, yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 4 rekomendasi senilai Rp 9,71 miliar dan 10.640 dolar AS.

Anggota Komisi V DPR Latief Hanafiah mengapresiasi Kemenhub yang berupaya menyelesaikan audit BPK. Namun demikian, dia meminta, Kemenhub menjelaskan lebih detail maksud tuntas dan tidak tuntas dari temuan yang ditindaklanjuti.

"Saya kira nanti perlu dijelaskan secara transparan dan mendetail lagi kegiatan-kegiatan yang dianggap tuntas itu seperti apa," ujar Latief.

Rapat mengenai hasil temuan BPK di lingkungan Kemenhub akan digelar lagi pada minggu depan. ■ KPJ